

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LINGKUNGAN:
STUDI KASUS LARANGAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI
BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 97 TAHUN
2018 DI KOTA DENPASAR**



oleh:

Ida Bagus Perdana Kumara

072014353008

**MAGISTER KEBIJAKAN PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
SEMESTER GENAP 2021/2022**

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LINGKUNGAN:
STUDI KASUS LARANGAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI
BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 97 TAHUN
2018 DI KOTA DENPASAR**



TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Magister Kebijakan Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Airlangga

Ida Bagus Perdana Kumara
072014353008

**MAGISTER KEBIJAKAN PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
SEMESTER GENAP 2021/2022**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LINGKUNGAN:
STUDI KASUS LARANGAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI
BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 97 TAHUN
2018 DI KOTA DENPASAR**

TELAH DISETUJUI

Pada Tanggal, 22 Agustus 2022

Pembimbing Ketua



Dr. Eko Supeno, Drs., M.Si
NIP 19650403 198911 1 001

Pembimbing Kedua,



Dr. Bintoro Wardiyanto, Drs., M.Si
NIP 19611224 198810 1 001

Mengetahui,

Ketua Program Magister Kebijakan Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Airlangga



Dr. Erna Setijaningrum, S.IP., M.Si.
NIP 19700503 200003 2 001

HALAMAN PENETAPAN PANITIA PEGUJI TESIS

Telah diuji pada tanggal : 22 Agustus 2022

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Sulikah Asmorowati, S.Sos., M.Dev.St., Ph.D

Anggota : 1. Dr. Tri Susantari, Dra., M.Si.

2. Dr. Erna Setijaningrum, S.IP..M.Si

3. Dr. Bintoro Wardiyanto, Drs.,M.Si

4. Dr. Eko Supeno, Drs., M.Si

HALAMAN PERSEMBAHAN

"Tesis ini saya persembahkan untuk keluarga tercinta, Ayah, Ibu, dan Adik-adik serta para Dosen Magister Kebijakan Publik beserta seluruh teman angkatan yang telah memberikan dukungan dan doa, juga Almamater yang saya banggakan, Universitas Airlangga"

MOTTO

“Hanya ikan besar yang mampu berenang melawan arus”

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul Analisis Implementasi Kebijakan Lingkungan: Studi Kasus Larangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 Di Kota Denpasar adalah satu bagian utuh yang sebagian maupun keseluruhan tesis tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan/atau universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan oleh individu selain penyusun kecuali dituliskan dengan format kutipan langsung maupun tidak langsung) dalam isi tesis. Sehingga apabila dikemudian hari ditemukan bukti bahwa pernyataan saya tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga

Surabaya, 22 Agustus 2022



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ida Bagus Perdana Kumara'.

Ida Bagus Perdana Kumara

HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan ke Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini. Saya menyadari bahwa tanpa dukungan, doa, dan bantuan dari banyak pihak tentu saya tidak mungkin dapat menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Keluarga tercinta atas doa dan dukungannya. Kepada Ajik Ida Bagus Astawa, Ibu Ida Ayu Ketut Yeni Pajariati, Adik Ida Ayu Widya Puspitasari, dan Adik bungsu Ida Bagus Trias Purnayana. Serta keluarga besar yang selalu mendukung setiap langkah dan keputusan yang saya ambil.
2. Terima kasih kepada pembimbing tesis saya. Bapak Dr. Eko Supeno dan Bapak Dr. Bintoro Wardiyanto yang telah meluangkan waktu, ilmu, dan tenaga untuk membimbing saya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini. Terima kasih atas kesabaran dalam memberikan bimbingan kepada saya, saya memohon maaf apabila ada banyak hal yang kurang berkenan di hati. Semoga Pak Eko dan Pak Bintoro selalu diberikan kesehatan, perlindungan, serta rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa.
3. Terima kasih kepada seluruh dosen Prodi Magister Kebijakan Publik atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis. Secara khusus kepada Bu Erna, Mba Churil, dan Mba Reni yang telah sering direpotkan selama ini. Semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan dan keberkahan
4. Kepada informan yang telah mau meluangkan waktunya untuk memberikan data dan informasi dalam memperoleh data dan informasi. Kepada PPLH Bali, Bu Catur dan Gung Tik, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Bu Wiratni, Pak Dwi, dan Pak Wira, serta Pak Gede Suteja, Pak Ngurah Wijaya, Bu Weniari, dan Pak Dewa. Juga kepada informan pelaku usaha dan masyarakat yang telah ikut berkontribusi. Semoga bapak ibu sekalian selalu sehat dalam perlindungannya.
5. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Sulikah, Bu Tri, dan Bu Erna yang telah sangat banyak membantu saat ujian tesis. Semoga ibu sekalian selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan.
6. Kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), atas kesempatan berharga yang diberikan kepada penulis untuk menempuh studi Magister Kebijakan Publik di Universitas Airlangga. Semoga penulis dapat terus berkontribusi dan bermanfaat untuk negara
7. Kepada keluarga besar Direktorat Jenderal Pajak, khususnya KPP Pratama Waingapu atas dukungan dan kesempatannya untuk dapat melanjutkan studi ini. Terkhusus kepada Pak Noviardi, Pak Karyono, dan Pak Hadi sebagai atasan yang selalu memberikan contoh baik kepada saya. Kepada teman seangkatan Willy, Ricky, Deril, dan Galih serta tambahan Gede dan

Mangko terima kasih atas ketawa, guyon, dan dukungannya. Semoga kalian sehat dan sejahtera selalu.

8. Tidak lupa kepada teman-teman seangkatan Prodi Magister Kebijakan Publik meski belum pernah bertemu secara langsung bersama-sama akibat Pandemi Covid-19 (Mas Ganjar, Pak Mathur, Pak Eko, Mbak Lusi, Mbak Amelia, Mas Diraisnu, Mas Bayu, Mas Emmanuel, Mas Jairi, Mas Valerianus, Mas Kukuh, dan Mas Yafi). Terima kasih atas kerja samanya selama perkuliahan. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan dalam segala hal. Astungkara.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan tesis yang berjudul Analisis Implementasi Kebijakan Lingkungan: Studi Kasus Larangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 Di Kota Denpasar sebagai salah satu persyaratan dalam program Magister Kebijakan Publik di Universitas Airlangga

Kebijakan larangan plastik sekali pakai merupakan kebijakan yang futuristik dan sangat sesuai dengan *core* pariwisata di Kota Denpasar, dan secara umum di Provinsi Bali. Berdasar dari kepedulian penulis pada kondisi sekitar yang melihat bahwa masyarakat mulai tidak patuh dalam mengikuti peraturan, membuat muncul rasa ingin tahu penulis pada alasan yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, penulis menganalisis bagian implementasi kebijakan peraturan ini. Pembahasan implementasi menjadi penting karena menurut Wagner (2017) instrumen larangan adalah yang paling efektif dalam mengurangi sampah plastik.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyempurnakan tesis ini, namun demikian penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak sekali kekurangan dan jauh dari sempurna karena keterbatasan dari pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran ataupun kritikan yang membangun dari berbagai pihak untuk menyempurnakan tesis ini. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Surabaya, 22 Agustus 2022

Penulis,



Ida Bagus Perdana Kumara

RINGKASAN

Perubahan pola konsumsi, pertumbuhan populasi dan peningkatan urbanisasi menyebabkan negara di dunia menghadapi tantangan terkait dengan pengelolaan sampah plastik. Plastik sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1950an hingga saat ini produksinya terus bertambah. Hingga saat ini terdapat 8,3 miliar ton plastik dan sekitar 60 persen dari jumlah tersebut berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan lingkungan.

Indonesia juga mengalami masalah pengelolaan sampah plastik. Indonesia menempati urutan pertama dalam jumlah sungai yang berkontribusi pada sampah plastik di lautan. Selain itu, Indonesia juga menduduki posisi ketiga tertinggi dalam rasio sampah plastik yang tidak terurus dengan benar dan masuk menjadi sampah di lautan. Sampah plastik yang tidak dikelola dengan benar adalah sampah plastik yang dibuang sembarangan, tidak diurus dengan benar (pembakaran sampah plastik secara terbuka), dan berada pada tempat pembuangan sampah namun jumlahnya tidak terkendali. Banyaknya jumlah sampah plastik tersebut dapat merusak tatanan ekonomi melalui turunnya kualitas alam yang kemudian menurunkan pasar sektor pariwisata.

Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi yang bertumpu pada sektor pariwisata. Majalah *Time* pada tahun 2011 menyampaikan kritik dengan menyebutkan bahwa Bali adalah tempat berlibur seperti neraka. Analogi tersebut diambil karena masalah sampah, limbah industri, dan kemacetan. Pada tahun 2018, *The Guardian* dan *BBC* memberitakan kondisi sampah plastik yang direkam oleh penyelam asal Inggris di Pulau Nusa Penida. Dalam publikasinya, masalah sampah plastik disebabkan oleh beberapa faktor seperti arus laut lintas Indonesia dan kiriman dari Pulau Jawa, perencanaan pemerintah yang buruk, dan tingkat kesadaran tentang limbah dan daur ulang yang minim.

Sebagai upaya pemecahan masalah tersebut, Pemerintah Daerah menerbitkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai melalui larangan pada tiga jenis plastik sekali pakai yaitu kantong plastik, styrofoam, dan sedotan. Menurut Wagner (2017) instrumen larangan adalah instrumen paling efektif dalam mengurangi sampah plastik. Sayangnya, dalam pengimplementasiannya belum efektif. Penelitian ini akan melakukan penelitian terkait itu di Kota Denpasar. Kota Denpasar saat ini mengalami peningkatan penggunaan plastik sekali pakai hingga 70 persen. Selain itu, jumlah kepadatan penduduk yang tinggi juga menjadi alasan dipilihnya lokasi penelitian ini.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan teori yang diadaptasi dari Ryan (2015) mengenai implementasi kebijakan iklim. Adaptasi teori ini dilakukan karena mempertimbangkan bahwa setiap kebijakan harus memiliki cara analisis yang spesifik. Dimana kebijakan ini lebih sesuai jika dianalisis dengan analisis kebijakan lingkungan. Selain itu,

pendekatan oleh Ryan (2015) mempertimbangkan faktor negara berkembang yang sesuai dengan lokasi penelitian. Menurut Ryan (2015) ada tiga faktor kunci yang dapat digunakan untuk melakukan analisis yaitu kapasitas pemerintah daerah, pemingkanaan publik, serta aktor dan faktor politik. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan mengombinasikan antara wawancara, pengamatan, dan data. Keterbatasan penelitian ada pada durasi penelitian yaitu periode April-Juli 2022 dengan informasi dan data yang diperoleh berdasarkan informan penelitian.

Hasil kajian menunjukkan bahwa berdasarkan faktor kunci kapasitas lokal, ditemukan tidak adanya pengawasan yang teratur dan penerapan sanksi yang tegas. Pemantauan secara reguler belum dilakukan karena keterbatasan sumber daya. Sanksi belum dilaksanakan karena belum ada Peraturan Daerah terkait sanksi tersebut. Dalam implementasinya, kebijakan tersebut menghadapi dua masalah, yaitu penolakan dari kelompok usaha dan sulitnya mengubah perilaku masyarakat. Kelompok usaha yang menolak adalah pengusaha plastik dan kelompok daur ulang plastik. Masalah perubahan perilaku masyarakat berasal dari tiga faktor utama, yakni konsumen, pelaku usaha, dan pandemi Covid-19. Selain itu, faktor keterbatasan sumber daya dan upaya *feedback* yang sampai saat ini belum terealisasi. Dari faktor kunci pemingkanaan lokal, diketahui bahwa implementasi kebijakan sesuai dengan permasalahan lokal dari sisi tempat. Dari segi waktu pelaksanaan, ada kendala. Kendala tersebut berasal dari Pandemi Covid-19. Adanya pandemi menyebabkan *restart* dan resistensi di masyarakat. Dari aktor dan faktor politik menunjukkan bahwa terdapat beberapa aktor yang memiliki kepentingan yang berbeda dengan tujuan kebijakan.

Dengan demikian, dari analisis tersebut, beberapa rekomendasi dapat ditawarkan untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan. Rekomendasi pertama adalah memperkuat dan mengimplementasikan instrumen kebijakan yang ada, terutama instrumen regulasi. Merevisi Peraturan Daerah agar sanksi bisa direalisasikan. Kemudian, revisi Peraturan Gubernur dengan menambahkan daftar pengecualian untuk beberapa produk yang belum mendapat alternatif yang tepat. Menambah instrumen kebijakan baru yaitu instrumen ekonomi bagi produsen, serta perbaikan sumber daya terutama anggaran. Akhirnya, menarik untuk penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan faktor-faktor kunci pemingkanaan lokal menggunakan metode analisis kuantitatif sehingga dapat memperkaya hasil penelitian.

SUMMARY

Changes in consumption patterns, population growth and urbanization have caused countries in the world to face challenges related to plastic waste management. Plastic since it was first introduced in the 1950s until now its production continues to grow. Today, there are 8.3 billion tons of plastic and about 60 percent of that amount ends up in Final Disposal Sites (TPA) and the environment.

Indonesia is also experiencing plastic waste management problems. Indonesia at the top position in the number of rivers that contribute to plastic waste in the oceans. In addition, Indonesia also occupies the third highest position in the ratio of plastic waste that is not properly managed and becomes garbage in the ocean. Plastic waste that is not managed properly is plastic waste that is disposed of carelessly, not managed properly (open burning of plastic waste), and it is in landfills but the amount is not controlled. The large amount of plastic waste can damage the economic order through the decline in the quality of nature which then reduces the tourism sector.

Bali Province is one of the provinces that relies on the tourism sector. *Time Magazine* in 2011 criticized by mentioning that Bali is a vacation place like hell. The analogy is taken because of the problem of garbage, industrial waste, and traffic. In 2018, *The Guardian* and *BBC* reported the condition of plastic waste recorded by British divers in Nusa Penida. In his publications, the problem of plastic waste is caused by several factors such as ocean currents across Indonesia and shipments from Java Island, poor government planning, and low level of awareness about waste and recycling.

As an effort to solve the problem, Local Government implement *Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018* to limit Single-use Plastic Waste through a ban on three types of single-use plastic, namely plastic bags, styrofoam, and straws. According to Wagner (2017), ban instrument is the most effective instrument in reducing plastic waste. Unfortunately, its implementation has not been effective. This research will conduct related research in Denpasar City. Denpasar is currently experiencing an increase in the use of single-use plastics by up to 70 percent. In addition, the high population density is also the reason for choosing the location of this study.

The purpose of this study was to determine the factors that led to the failure of the policy implementation. This study uses a theory adapted from Ryan (2015) regarding the implementation of climate policy. The adaptation of this theory is carried out because it considers that each policy must have a specific way of analysis. Where this policy is more appropriate if analyzed by environmental policy approach. In addition, the approach by Ryan (2015) considers developing country factors that are in accordance with the research location. According to Ryan (2015) there are three key factors that can be used to carry out the analysis, namely the capacity of local governments, public framing, as well as political actors and

factors. The research was conducted using a qualitative method by combining interviews, observations, and data. The limitation of this study is the duration of the study April-July 2022 with information and data obtained based on research informants.

The results of the study show that, based on local capacity key factor, it was found there was no regular monitoring and strict sanctions applied. Regular monitoring has not been carried out due to limited resources. Sanctions have not been implemented because there are no *Peraturan Daerah* related to the sanctions. During the implementation, the policy faced two problems, namely the refusal from business groups and difficulty of changing people's behavior. The business groups that refuse are plastic entrepreneurs and plastic recycling groups. Problem of changing people's behavior comes from three main factors, namely consumers, business actors, and the Covid-19 pandemic. In addition, limited resources factor and feedback efforts which until now has not been realized. From local framing key factor, it is known that implementation of policies in accordance with local problems from the side of the place. In terms of implementation time, there is an obstacle. The obstacle comes from the Covid-19 Pandemic. The existence of a pandemic causes a restart and resistance in society. From political actor and factor indicate that there are several actors who have different interests with policy objectives.

Thus, from the analysis, several recommendations can be offered to improve the effectiveness of policy implementation. First recommendation is to strengthen and implement existing policy instruments, especially regulatory instruments. Revise the *Peraturan Daerah* so that sanctions can be realized. Then, revision the *Peraturan Gubernur* by adding an exceptional list to several products that have not received the right alternative. Adding new policy instruments, namely economic instruments for producers, as well as improvements the resources, especially the budget. Finally, it is interesting for further research to develop key local framing factors using quantitative analysis methods so as to enrich the research results.

ABSTRAK

Peningkatan produksi plastik selama tujuh dekade menimbulkan kekhawatiran tentang ketidakmampuan plastik untuk terurai. Data di tingkat nasional dan internasional menunjukkan bahwa kondisi sampah plastik sangat memprihatinkan, termasuk kawasan pariwisata seperti Provinsi Bali. Sampah plastik tersebut menurunkan kualitas pariwisata dan berujung pada penurunan ekonomi. Pemerintah daerah menerapkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 dengan melarang tiga jenis plastik sekali pakai yaitu kantong plastik, styrofoam, dan sedotan. Namun, saat ini penggunaan plastik sekali pakai kembali meningkat. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan yang tidak optimal. Metode yang digunakan adalah kualitatif melalui observasi, wawancara, dan data sekunder. Model analisis yang digunakan diadaptasi dari Ryan (2015) yang fokus pada kebijakan lingkungan. Penelitian ini menggunakan 7 informan pemerintah, 2 informan LSM, 10 informan pelaku usaha, dan 3 informan masyarakat publik serta mengambil lokasi di Denpasar. Tidak optimalnya implementasi kebijakan disebabkan oleh beberapa faktor. Dari faktor kapasitas pemerintah, belum adanya sanksi dan pengawasan yang teratur, keterbatasan sumber daya, dan upaya umpan balik yang belum terealisasi menjadi kendala kebijakan ini. Skala masalah yang dihadapi saat implementasi yaitu penolakan dari kelompok usaha terkait dan perubahan perilaku masyarakat. Dari faktor kunci pembimbingan lokal, kebijakan tersebut sesuai dengan permasalahan lokal dari segi tempat, namun dari segi waktu pelaksanaan terdapat kendala yaitu munculnya Pandemi Covid-19 yang menggeser fokus pemerintah dan masyarakat. Selain itu, manfaat langsung yang masih belum dirasakan oleh kebanyakan orang juga dicatat dalam penelitian ini. Terakhir terdapat aktor yang memiliki perbedaan kepentingan dengan tujuan kebijakan.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan Lingkungan, Larangan, Plastik Sekali Pakai, Denpasar

ABSTRACT

Seven decades of plastic production led to an increase in the inability of plastics to biodegrade. Data at national and international levels show that condition of plastic waste is very important, including tourism areas such as Bali Province. The plastic waste reduces the tourism quality then decreases the economy. Local government implemented *Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018* with a ban on three types of single-use plastic, namely plastic bags, Styrofoam, and straws. However, now the use of single-use plastic is increasing again. This study aims to analyze the implementation of policies that are not optimal. Method used is qualitative through observation, interviews, and secondary data. Analytical model used is adapted from Ryan (2015) which focuses on environmental policy. This study used 7 government, 2 NGO, 10 business, and 3 community informants and took location in Denpasar. The non-optimal implementation of policies is caused by several factors. From government's capacity factor, there are no sanctions and regular monitoring, limited resources, and feedback efforts that have not been realized. The scale of the problems faced during implementation is rejection from business group and behavior change. From local framing factor, the policy is in accordance with local problems in terms of place, but from the time of implementation there are obstacles to the emergence of Covid-19 Pandemic which focuses on the government and society. In addition, direct benefits that most people still haven't experienced were also noted in this study. Finally, there are actors who have different interests with policy objectives.

Keywords: Implementation, Environmental Policy, Ban, Single-Use Plastic, Denpasar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PEGUJI TESIS	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	vii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	viii
KATA PENGANTAR	x
RINGKASAN	xi
SUMMARY	xiii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
BAB II.....	14
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	14
2.2 Definisi Plastik Sekali Pakai	33
2.3 Kebijakan Plastik Sekali Pakai.....	37
2.5 Kerangka Teori.....	41
2.5.1 Kebijakan Publik.....	41
2.5.2 Implementasi Kebijakan	43
2.5.3 Model Implementasi Kebijakan	47
2.5.4 Komparasi Model-model Implementasi.....	57
2.5.5 Implementasi Kebijakan Lingkungan	59
2.5.6 Analisis Implementasi Kebijakan dalam Penelitian.....	69
2.6 Kerangka Berpikir	72
2.7 Kebaruan Penelitian	73
2.8 Definisi Konsep.....	75

BAB III	77
3.1 Tipe Penelitian	77
3.2 Ruang Lingkup dan Lokasi Penelitian	77
3.3 Informan Penelitian.....	78
3.4 Instrumen Penelitian.....	80
3.5 Teknik Pengumpulan	80
3.6 Analisis Data	81
3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	83
3.8 Keterbatasan Penelitian.....	85
BAB IV	86
4.1 Kondisi Demografi Kota Denpasar	86
4.2 Kondisi Sampah Plastik Kota Denpasar	87
4.3 Perkembangan Kebijakan Plastik Sekali Pakai di Indonesia	89
4.4 Kebijakan Larangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018	93
BAB V.....	101
5.1 Kapasitas Pemerintah Daerah	101
5.1.1 Administrasi dan skala masalah.....	101
5.1.2 Pendanaan	122
5.1.3 Sumber Daya Manusia	127
5.1.4 Informasi dan Data.....	135
5.2 Pembimbingan Lokal.....	142
5.2.1 Kesesuaian Dengan Masalah Daerah	142
5.2.2 Manfaat Langsung.....	144
5.3 Aktor dan Faktor Politik.....	147
5.3.1 Promosi Kebijakan	150
5.3.2 Dukungan atau Hambatan Kelompok Masyarakat	151
5.3.3 Keterlibatan Partai Politik.....	153
BAB VI	155
6.1 Interpretasi Teoritik	155
6.1.1 Kapasitas Pemerintah Daerah	155
6.1.2 Pembimbingan Lokal.....	158
6.1.3 Aktor dan Faktor Politik.....	159
6.2 Interpretasi Penelitian Terdahulu	160

6.3 Analisis Data	162
BAB VII	165
7.1 Kesimpulan	165
7.2 Rekomendasi	167
7.3 Implikasi Akademis dan Praktis.....	170
DAFTAR PUSTAKA	171
LAMPIRAN	178

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Statistik Sampah Plastik Dunia Tahun 2019.....	3
Tabel 2 Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis dan Sumber Sampah Tahun 2020	4
Tabel 3 Keterkaitan Penelitian Terdahulu	30
Tabel 4 Kebijakan untuk Membatasi Plastik Sekali Pakai menurut <i>UN</i> <i>Environtment</i>	38
Tabel 5 Kebijakan untuk Membatasi Plastik Sekali Pakai menurut Wagner.....	38
Tabel 6 Komparasi Model-model Implementasi Kebijakan	58
Tabel 7 Faktor Kunci Implementasi Kebijakan dalam Penelitian	71
Tabel 8 Daftar Informan Penelitian.....	79
Tabel 9 Status Demografi Berdasarkan Jenis Kelamin.....	86
Tabel 10 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota	87
Tabel 11 Komposisi Sampah	87
Tabel 12 Sumber sampah	88
Tabel 13 Jumlah Sampah Plastik Kota Denpasar Periode 2019-2021	89
Tabel 14 Target Jakstrada 2018-2025 Kota Denpasar	91
Tabel 15 Daftar Instrumen Kebijakan Terkait Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018	92
Tabel 16 Tim Pembinaan dan Pengawasan Pembatasan Plastik Sekali Pakai.....	97
Tabel 17 Daftar Penggugat Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018	113
Tabel 18 Kelebihan Timbulan Sampah berdasarkan Target Jakstrada Kota Denpasar	137
Tabel 19 <i>Feedback</i> Masalah Implementasi.....	137

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Produksi Plastik Dunia Tahun 1950-2015	2
Gambar 2 Plastik Sekali Pakai menurut Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018	
(a) kantong plastik; (b) <i>styrofoam</i> ; (c) sedotan plastik	6
Gambar 3 Jumlah Sampah Plastik di Kota Denpasar.....	11
Gambar 4 Produksi Plastik Global Berdasarkan Sektor Industri	34
Gambar 5 Model Proses Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn	49
Gambar 6 Model Implementasi Sabatier dan Mazmanian	57
Gambar 7 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan	69
Gambar 8 Adaptasi Faktor Kunci Implementasi Kebijakan	70
Gambar 9 Kerangka Berpikir	73
Gambar 10 Kebijakan terkait Plastik Sekali Pakai di Tingkat Nasional.....	90
Gambar 11 Bagan Pelaksanaan Kebijakan Larangan Plastik Sekali Pakai....	Error!
Bookmark not defined.	
Gambar 12 Upaya Pengawasan oleh Pemerintah Daerah.....	112
Gambar 13 Permohonan Keberatan	115
Gambar 14 Koordinasi dan Sosialisasi Dinas Lingkungan Provinsi Bali dan Kota Denpasar.....	124
Gambar 15 Sosialisasi oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfos) Provinsi Bali	129
Gambar 16 (a) Logo LSM terlibat; (b) <i>Forum Group Discussion</i> , bersama Pemerintah, LSM dan Masyarakat 23 Oktober 2021; (c) Produk Bersama Tas <i>Reusable</i>	132
Gambar 17 Kegiatan Penguatan Strategis Implementasi Kebijakan Pelarangan Plastik Sekali Pakai 24 dan 27 Mei 2022.....	133